

ETIKA KEKUASAAN: REFLEKSI FILOSOFIS ATAS MORALITAS DALAM TINDAKAN POLITIK

Oleh:

Rahmad Ramadhan

Universitas Islam Negeri M.Djamil Djambek Bukittinggi

E-mail : rramadhanofficial@gmail.com

Abstract

Power is a fundamental reality in human political life, yet its relationship with ethics has always been a subject of debate. In modern political practice, especially in Indonesia, power is often exercised through pragmatic logic that neglects moral values and public responsibility. This study aims to philosophically reflect on the relationship between power and ethics in political action and to reaffirm its relevance to contemporary Indonesian politics. Employing a philosophical hermeneutic approach, this research analyzes both classical and modern works including those of Plato, Machiavelli, Kant, Arendt, and Foucault alongside a contextual reading of political power in Indonesia. The reflection reveals that power detached from ethics tends to produce a moral legitimacy crisis and political dehumanization. Conversely, ethics provides a normative compass for the exercise of power to ensure justice, humanity, and moral accountability. In the Indonesian context, the values of Pancasila serve as the foundation of political ethics, balancing political effectiveness with moral integrity. Thus, this study emphasizes the necessity of constructing a paradigm of ethical power grounded in virtue, rational participation, and ethical awareness as the philosophical basis of a dignified democratic politics.

Keywords: Philosophical Hermeneutics, Political Philosophy, Public Ethics, Contemporary Indonesian politics

Abstrak

Kekuasaan merupakan realitas fundamental dalam kehidupan politik manusia, namun relasinya dengan etika selalu menimbulkan perdebatan. Dalam praktik politik modern, terutama di Indonesia, kekuasaan kerap dijalankan dengan logika pragmatis yang mengabaikan nilai moral dan tanggung jawab publik. Penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan secara filosofis hubungan antara kekuasaan dan etika dalam tindakan politik, serta menegaskan relevansinya bagi kehidupan politik Indonesia kontemporer. Kajian ini menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis dengan menganalisis karya-karya klasik dan modern, seperti Plato, Machiavelli, Kant, Arendt, dan Foucault, disertai pembacaan kontekstual terhadap fenomena kekuasaan di Indonesia. Hasil refleksi menunjukkan bahwa kekuasaan yang dilepaskan dari etika berpotensi menimbulkan krisis legitimasi moral dan dehumanisasi politik. Sebaliknya, etika memberikan arah normatif bagi kekuasaan agar dijalankan secara adil, manusiawi, dan bertanggung jawab. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai dasar etika kekuasaan yang menyeimbangkan antara efektivitas politik dan moralitas publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun paradigma kekuasaan yang berlandaskan kebajikan, partisipasi rasional, dan kesadaran etis sebagai fondasi politik demokratis yang bermartabat.

Kata Kunci: Hermeneutika Filosofis, Filsafat Politik, Etika Publik, Politik Indonesia Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Kekuasaan sejak lama menjadi tema sentral dalam refleksi filsafat politik. Ia mampu membangun peradaban sekaligus menghancurkannya. Dalam sejarah pemikiran politik, kekuasaan kerap dipandang sebagai entitas netral secara moral, padahal implikasinya terhadap kehidupan manusia sangat besar. Thomas Hobbes misalnya, memahami kekuasaan sebagai kontrak sosial untuk menghindari kekacauan (Wijaya 2016), sementara Machiavelli melihatnya sebagai seni mempertahankan dominasi (Faturrahman 2025). Pandangan ini menekankan stabilitas politik, tetapi sering kali mengabaikan dimensi etika yang melekat dalam relasi antara penguasa dan yang dikuasai. Pertanyaan mendasar pun muncul apakah kekuasaan harus dilepaskan dari etika demi efektivitas politik, atau justru kekuasaan perlu dikawal oleh prinsip moral agar tidak menyimpang?

Krisis etika dalam ranah kekuasaan bukanlah hal yang baru, namun gejalanya semakin akut di masa kini. Manipulasi informasi, politik identitas, dan korupsi menjadi bagian dari sistem yang tampaknya telah membudaya. Kekuasaan digunakan bukan lagi untuk mewujudkan kebaikan kolektif, melainkan untuk mempertahankan kepentingan elit politik. Di sisi lain, masyarakat menjadi apatis terhadap standar moral dalam politik, karena realitas menunjukkan bahwa etika tidak lagi menjadi ukuran keberhasilan dalam kepemimpinan (Setiawan dan Fauzi 2019). Dalam situasi inilah peran filsafat menjadi penting sebagai ruang refleksi yang melampaui kalkulasi elektoral. Filsafat tidak hanya menilai apa yang efektif, tetapi juga mempertanyakan apa yang benar dan adil dalam praktik kekuasaan. Dalam tradisi filsafat klasik, etika dan politik tidak dapat dipisahkan. Plato dalam *The Republic* menegaskan bahwa negara ideal harus dipimpin oleh filsuf mereka yang memahami kebenaran dan kebaikan sejati. Bagi Plato,

penguasa sejati adalah mereka yang bermoral, bukan sekadar berkuasa. Aristoteles memperluas pandangan ini melalui konsep *eudaimonia* atau kehidupan baik, di mana tujuan politik adalah kebaikan kolektif (Cambridge, Tom Griffith 2020).

Namun, pendekatan ini mengalami perubahan pada masa modern ketika Machiavelli dalam *The Prince* secara tegas memisahkan moralitas dari politik. Ia menilai bahwa keberhasilan politik ditentukan oleh hasil, bukan oleh moralitas tindakan. Inilah titik awal munculnya realisme politik, di mana efektivitas menjadi ukuran utama, bukan kebenaran moral. (Parks 2014). Berbeda dengan tradisi klasik dan realisme politik, pemikiran kontemporer seperti Hannah Arendt dan Michel Foucault mengajukan kritik terhadap cara pandang kekuasaan yang terpusat. Arendt membedakan antara kekuasaan dan kekerasan baginya, kekuasaan sejati lahir dari tindakan kolektif yang berlandaskan persetujuan, sedangkan kekerasan muncul saat komunikasi dan keadilan gagal (Jemali 2015). Foucault lebih radikal lagi ia mengatakan kekuasaan bukan hanya dimiliki, tetapi tersebar melalui wacana dan pengetahuan (Siregar 2021). Perspektif ini menantang pemahaman klasik dan modern, dengan menunjukkan bahwa kekuasaan selalu berkaitan dengan produksi kebenaran dan subjektivitas. Maka, etika tidak lagi sekadar pedoman moral penguasa, tetapi juga bentuk resistensi terhadap dominasi.

Sementara itu, pemikir seperti Jürgen Habermas menekankan bahwa legitimasi kekuasaan harus dibangun melalui komunikasi rasional dan partisipatif. Etika diskursus menjadi dasar bagi demokrasi deliberatif (Zakiyah dkk. 2024). Pandangan ini mengembalikan etika ke dalam ruang publik dan menolak manipulasi sebagai instrumen politik. Di sisi lain, Jean-Jacques Rousseau menegaskan bahwa kekuasaan bersumber dari kehendak umum (*volonté générale*), sehingga legitimasi politik bergantung pada kesepakatan moral kolektif

(Solosumantro 2025). Pandangan-pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan etika dalam kekuasaan bersifat dinamis dan terus berubah mengikuti konteks sosialnya

Konteks politik Indonesia modern memperlihatkan relevansi besar bagi diskursus ini. Politik elektoral yang pragmatis sering mengorbankan moralitas demi elektabilitas, sementara kekuasaan kerap dipraktikkan sebagai sarana mempertahankan dominasi. Di sisi lain, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etis kehidupan berbangsa sering kali hanya dijadikan simbol tanpa implementasi konkret. Dalam situasi seperti ini, refleksi filosofis tentang etika kekuasaan menjadi penting untuk menegaskan kembali bahwa legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi juga oleh moralitas cara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merefleksikan secara filosofis hubungan antara kekuasaan dan etika dalam tindakan politik.

Pertanyaan utama yang akan dikaji mencakup: (1) bagaimana kekuasaan dan etika dipahami dalam tradisi filsafat politik klasik dan modern; (2) apakah tindakan politik dapat dibenarkan secara moral meskipun mengandung unsur manipulasi atau kekerasan; dan (3) bagaimana filsafat politik dapat menawarkan kerangka etis bagi praktik kekuasaan di tengah realitas politik yang pragmatis. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dalam membangun politik yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan bermartabat secara moral.

A. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat reflektif dengan menggabungkan analisis historis dan konseptual terhadap gagasan para filsuf klasik hingga kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran terhadap perubahan makna kekuasaan dan moralitas

dari waktu ke waktu serta relevansinya dalam praktik politik modern.

Metode utama yang digunakan adalah hermeneutika filosofis, yaitu upaya menafsirkan makna teks-teks filsafat secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan etis tempat gagasan itu lahir. Pendekatan hermeneutika tidak hanya membaca teks secara literal, tetapi juga memahami horizon makna yang tersembunyi di baliknya. Dalam konteks penelitian ini, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan karya-karya pemikir seperti Plato, Aristoteles, Machiavelli, Kant, Foucault, Arendt, dan Rawls dalam terang problem politik kontemporer. Pendekatan ini bersifat reflektif, artinya tidak sekadar mendeskripsikan pandangan filsuf, tetapi juga mengaitkannya dengan refleksi kritis terhadap situasi politik masa kini, terutama fenomena pragmatisme dan krisis moral dalam kekuasaan. Dengan demikian, analisis dilakukan melalui proses dialektis antara teks dan konteks—antara gagasan filosofis dan kenyataan empiris kekuasaan di era modern. Data penelitian bersumber dari studi pustaka (*library research*) yang mencakup karya-karya primer para filsuf dan literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan.

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga langkah utama: (1) deskripsi konseptual terhadap pemikiran setiap filsuf tentang kekuasaan dan moralitas; (2) interpretasi hermeneutik terhadap makna dan relevansi pemikiran tersebut dalam konteks politik modern; serta (3) refleksi normatif untuk merumuskan prinsip-prinsip etika kekuasaan yang dapat diterapkan dalam praksis politik Indonesia.

Tujuan dari penerapan metode ini bukan untuk menguji hipotesis empiris, tetapi untuk membangun argumentasi normatif yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan dapat dijalankan secara etis. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan sintesis konseptual yang tidak

hanya bersifat historis-deskriptif, tetapi juga reflektif dan aplikatif terhadap persoalan moralitas politik di era pragmatisme.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Antara Kekuasaan Dan Etika Dipahami Dalam Tradisi Filsafat Politik Klasik Dan Modern

Dalam filsafat politik klasik, kekuasaan dan etika merupakan dua entitas yang saling terkait. Plato menyatakan bahwa penguasa ideal adalah filsuf, karena hanya filsuf yang memahami konsep kebaikan sejati (Andini dkk., 2024). Bagi Plato, kekuasaan harus tunduk pada keadilan sebagai nilai tertinggi. Aristoteles pun melihat politik sebagai sarana mencapai *eudaimonia* atau kebahagiaan hidup (Putri dkk., 2024), di mana tujuan politik adalah mencapai kehidupan baik bagi seluruh warga. Dengan demikian, dalam pandangan klasik, kekuasaan memiliki orientasi moral; politik dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama, bukan sekadar perebutan kekuasaan.

Namun, transformasi pandangan ini terjadi pada masa modern ketika Machiavelli memperkenalkan realisme politik dalam karyanya *Il Principe*. Ia menegaskan bahwa keberhasilan politik bergantung pada efektivitas tindakan, bukan moralitasnya. Bagi Machiavelli, pemimpin harus siap menggunakan tipu daya, manipulasi, bahkan kekerasan demi menjaga stabilitas negara (Machiavelli 2014). Dengan demikian, politik dipisahkan dari etika dan diarahkan pada tujuan pragmatis. Pemisahan ini menandai pergeseran dari politik berbasis kebijakan menuju politik berbasis hasil.

Sebagai antitesis terhadap pandangan tersebut, Immanuel Kant menegaskan bahwa tindakan politik harus tetap tunduk pada prinsip moral universal. Ia menolak gagasan bahwa tujuan dapat membenarkan cara. Menurutnya, tindakan politik hanya sah jika selaras dengan

imperatif kategoris prinsip yang dapat dijadikan hukum moral universal. Kekuasaan yang menyalahi martabat manusia, sekalipun efektif, kehilangan legitimasi moralnya (Bendianto dkk., 2024). Pertentangan antara Machiavelli dan Kant ini menggambarkan dilema etika kekuasaan: antara efektivitas dan keadilan, antara hasil dan prinsip. Filsafat politik modern kemudian berdiri di antara dua ekstrem ini, mencoba mencari keseimbangan antara realitas kekuasaan dan ideal moralitas.

2. Pembeneran Moral atas Manipulasi dan Kekerasan dalam Politik

Pertanyaan tentang pembeneran moral terhadap kekerasan dan manipulasi selalu menjadi titik krusial dalam etika kekuasaan. Machiavelli membenarkan tindakan yang tampak tidak bermoral selama tujuannya menjaga stabilitas negara (Machiavelli 2014). Sebaliknya, Bagi kaum deontolog seperti Immanuel Kant, tidak ada alasan moral yang sah untuk membenarkan manipulasi atau kekerasan. Etika harus berdiri di atas prinsip yang dapat dijadikan hukum universal. Jika manipulasi dibenarkan dalam politik, maka secara rasional, siapa pun dapat menggunakannya, yang justru menghancurkan kepercayaan publik. Kekerasan, meskipun bertujuan baik, tetap melanggar martabat manusia sebagai makhluk rasional (Kusuma dkk., 2022). Dalam pandangan ini, tindakan politik hanya sah secara moral jika tidak melanggar hak-hak dasar individu. Prinsip otonomi moral menuntut agar politik dijalankan secara transparan, jujur, dan adil. Maka, manipulasi politik, sekalipun efektif, tidak pernah dapat dibenarkan secara etis dalam kerangka moral Kantian. Hal ini memperlihatkan batas mutlak antara etika dan pragmatisme.

Sebaliknya, pendekatan teleologis seperti utilitarianisme menawarkan pembeneran moral jika tindakan politik membawa hasil terbesar bagi kebaikan bersama. Dalam konteks ini, manipulasi atau kekerasan bisa diterima bila mencegah

kerugian yang lebih besar. Misalnya, intervensi militer demi mencegah genosida dapat dilihat sebagai kekerasan yang sah secara etis. Begitu pula kebijakan manipulatif yang bertujuan menciptakan stabilitas sosial jangka panjang. Namun pendekatan ini rawan disalahgunakan, karena penguasa bisa mengklaim bahwa semua tindakan mereka adalah demi kebaikan umum (Jumartono 2023). Evaluasi moral dalam utilitarianisme bergantung pada konsekuensi, bukan pada prinsip. Hal ini seringkali mengaburkan batas antara tindakan etis dan tidak etis.

Dalam kenyataannya, tindakan politik yang mengandung manipulasi sering kali dibungkus dengan narasi moral. Misalnya, seorang pemimpin mungkin memanipulasi informasi demi menjaga ketertiban publik atau mencegah kepanikan. Pertanyaannya: apakah niat baik cukup untuk membenarkan pelanggaran terhadap kebenaran? Dalam etika politik, motif dan hasil harus sama-sama diperhitungkan. Niat yang luhur tidak serta merta menghapuskan bobot moral dari tindakan yang merugikan pihak lain. Justru di sinilah pentingnya transparansi dan akuntabilitas (Maleng dkk. 2024). Ketika penguasa memutuskan untuk memanipulasi atau menggunakan kekerasan, mereka harus siap memberikan pertanggungjawaban etis. Tanpa mekanisme etika, kekuasaan dapat dengan mudah tergelincir menjadi penindasan terselubung.

Disamping itu, Michel Foucault menyoroti bahwa kekuasaan selalu bekerja secara subtil dalam membentuk subjektivitas dan kebenaran. Manipulasi bukan hanya terjadi secara terang-terangan, melainkan dalam bentuk normalisasi nilai dan kontrol wacana. Kekerasan dalam bentuk represif memang mudah dikenali, tetapi kekerasan simbolik dalam bentuk pengetahuan yang direayasa lebih sulit dibedakan. Dalam kerangka ini, tindakan politik hampir tidak pernah netral secara moral, karena kekuasaan selalu melibatkan bentuk-bentuk dominasi. Pertanyaannya bukan apakah manipulasi

dibenarkan, tetapi siapa yang berhak menentukan apa yang disebut manipulatif atau sah (Agus 2024). Pandangan ini menantang etika normatif dan memperlihatkan kerumitan dalam mengevaluasi moralitas tindakan politik secara mutlak. Etika menjadi medan perebutan makna, bukan patokan tunggal.

Dalam sistem demokrasi, legitimasi kekuasaan semestinya didasarkan pada keterbukaan dan persetujuan rakyat. Namun dalam praktik, politik elektoral sering diwarnai taktik manipulatif, seperti hoaks, framing media, dan pengaburan isu (Khamdan, 2021). Hal ini menimbulkan dilema moral: apakah strategi itu sah jika hasilnya adalah pemerintahan yang stabil? Demokrasi tanpa etika akan melahirkan krisis kepercayaan dan melemahkan fondasi sosial. Oleh karena itu, tindakan politik dalam demokrasi harus tetap tunduk pada prinsip etis meskipun berada dalam persaingan yang keras. Kejujuran dan tanggung jawab harus tetap dijaga sebagai nilai dasar demokrasi. Jika tidak, manipulasi akan menjadi norma, bukan pengecualian, dan kekuasaan akan kehilangan nilai moralnya.

Pandangan Hannah Arendt menawarkan pendekatan yang relevan, terutama dalam konteks kekerasan politik. Ia membedakan antara kekuasaan dan kekerasan: kekuasaan lahir dari kesepakatan dan tindakan kolektif, sedangkan kekerasan muncul ketika dialog dan konsensus gagal. Kekuasaan sejati, menurut Arendt, tidak membutuhkan kekerasan untuk bertahan. Kekerasan, meskipun efektif dalam jangka pendek, justru menandakan kegagalan politik. Maka dari itu, tindakan politik yang mengandung kekerasan adalah bentuk kebangkrutan etis. Dalam pandangan Arendt, legitimasi tindakan politik hanya bisa diperoleh dari partisipasi aktif warga, bukan dari paksaan. (Jemali 2015) Ini menegaskan bahwa tindakan politik hanya etis jika menghormati kebebasan dan martabat manusia.

Dari berbagai perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa manipulasi dan kekerasan dalam politik hanya dapat dibenarkan secara moral dalam kondisi yang sangat terbatas dan bahkan itu pun tetap kontroversial. Pendekatan deontologis menolak segala bentuk pembenaran atas pelanggaran moral, sedangkan pendekatan teleologis dan pragmatis memberi ruang bagi evaluasi berdasarkan hasil. Namun keduanya menyepakati bahwa kekuasaan tanpa etika akan kehilangan legitimasinya. Oleh karena itu, tindakan politik, apa pun bentuknya, harus tunduk pada pertimbangan etis yang jujur dan bertanggung jawab. Dalam dunia yang semakin kompleks, penting bagi para pelaku politik untuk tidak hanya mengejar efektivitas, tetapi juga integritas moral. Hanya dengan demikian, kekuasaan dapat dijalankan secara manusiawi dan bermartabat.

3. Filsafat Politik Dapat Menawarkan Kerangka Etis Dalam Praktik Kekuasaan Di Tengah Realitas Politik Yang Pragmatis

Di tengah realitas politik yang semakin pragmatis, praktik kekuasaan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip moral demi kepentingan strategis dan kekuasaan jangka pendek. Dalam situasi ini, filsafat politik hadir sebagai alat reflektif yang menawarkan kerangka etis bagi tindakan politik. Ia tidak hanya menilai apa yang efektif, tetapi juga mempertanyakan apa yang benar dan adil. Dengan menggali nilai-nilai dasar seperti keadilan, tanggung jawab, dan partisipasi, filsafat memberikan panduan normatif dalam menjalankan kekuasaan (Rahmadewi dkk., 2025). Pendekatan ini menjadi penting agar politik tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, bukan sekadar pada kalkulasi kekuasaan.

4. Etika Politik dalam Cengkeraman Realitas Pragmatisme

Realitas politik saat ini ditandai oleh pragmatisme yang dominan: efektivitas lebih

diutamakan dibandingkan prinsip moral. Strategi politik seringkali ditentukan oleh kepentingan jangka pendek, elektabilitas, dan perhitungan kekuasaan (Pangareho 2024). Dalam konteks ini, filsafat politik hadir bukan untuk memberi solusi teknokratis, melainkan menyajikan kerangka normatif yang memandu arah tindakan. Filsafat politik mempertanyakan tidak hanya apa yang terjadi, tetapi apa yang seharusnya terjadi. Dengan demikian, filsafat tidak tunduk pada realitas, tetapi mengkritisi dan menata ulang realitas itu berdasarkan nilai-nilai dasar. Kehadiran filsafat penting agar kekuasaan tidak kehilangan arah moral. Di tengah pragmatisme politik, kerangka etika menjadi pedoman untuk menilai dan memperbaiki arah kekuasaan.

Salah satu cara filsafat politik menawarkan kerangka etis adalah melalui penguatan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kebebasan. Pemikir seperti John Rawls, dalam *A Theory of Justice*, memperkenalkan prinsip keadilan sebagai fairness. Ia menyarankan agar struktur sosial-politik dirancang sedemikian rupa agar menguntungkan pihak paling lemah. Konsep ini menantang pendekatan pragmatis yang hanya berpihak pada kekuatan mayoritas (Rawls 1971). Rawls menyusun teori kontrak sosial yang etis, bukan semata legal formal. Dalam konteks ini, filsafat politik mengingatkan bahwa kebijakan publik harus dinilai dari sudut moral, bukan sekadar hasil. Maka, politik yang etis adalah yang mampu menyeimbangkan efisiensi dengan keadilan substantif. Selain Rawls, tokoh seperti Jürgen Habermas menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif dalam membentuk kebijakan yang etis. Ia percaya bahwa legitimasi politik tidak cukup hanya bersumber dari prosedur legal, tetapi dari partisipasi dan kesepakatan bersama melalui dialog yang rasional. Dengan pendekatan ini, kekuasaan harus dibatasi oleh kewajiban untuk mendengar dan melibatkan warga negara secara aktif. Ini berbeda dengan logika pragmatis yang cenderung manipulatif dan eksklusif. Filsafat Habermas

menekankan bahwa ruang publik harus dijaga dari distorsi komunikasi akibat kapital, kekuasaan, dan propaganda. Maka, filsafat politik tidak hanya memberi etika normatif, tetapi juga mendesain bentuk komunikasi yang adil dan terbuka (Rizqian 2023).

Filsafat politik juga memberi kontribusi etis melalui kritik terhadap ideologi dan hegemoni. Antonio Gramsci, misalnya, melihat bahwa kekuasaan seringkali membentuk konsensus melalui dominasi ideologi tanpa paksaan langsung. Maka, kerangka etis dalam politik tidak hanya menilai tindakan, tetapi juga memeriksa cara berpikir yang dibentuk oleh kekuasaan. Dalam situasi ini, filsafat berperan sebagai alat pembongkaran (demistifikasi) terhadap narasi-narasi yang membenarkan ketidakadilan. Dengan kesadaran kritis, masyarakat dapat menilai kembali kebijakan yang tampak netral namun sebenarnya berpihak. Politik yang etis bukan hanya tentang niat baik, tetapi tentang kesadaran struktural atas relasi kuasa yang membentuknya (Maulidiastuti dan Ahmadi, 2025). Di sinilah filsafat berfungsi sebagai korektor sistemik.

Namun demikian, tantangan besar muncul ketika politik dijalankan dalam sistem yang sangat pragmatis dan penuh kompromi. Banyak nilai etis yang akhirnya dikorbankan atas nama stabilitas, elektabilitas, atau kelangsungan pemerintahan. Dalam konteks ini, filsafat politik tidak bisa hanya menjadi kritik normatif, tetapi harus menjadi panduan praktis yang bisa diterapkan. Prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus diterjemahkan ke dalam mekanisme institusional. Misalnya, melalui peraturan yang membatasi konflik kepentingan, atau lembaga etik politik yang independen (Pangareho 2024). Tanpa penerapan praktis, filsafat hanya akan menjadi wacana elitis yang terputus dari kenyataan politik. Oleh karena itu,

diperlukan sinergi antara idealisme dan realitas.

Filsafat Timur dan perspektif non-Barat juga memberi sumbangan penting dalam membangun kerangka etis kekuasaan. Misalnya, Konfusius menekankan bahwa pemimpin harus memiliki *de* (kebijaksanaan moral), dan bahwa harmoni sosial hanya dapat tercapai jika penguasa bersikap adil dan bijak. Prinsip ini menentang logika kekuasaan yang otoriter dan manipulatif. Di Indonesia sendiri, nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan dasar etis untuk menilai tindakan politik (Raimundus dkk, 2024). Filsafat lokal seperti ini menawarkan cara berpikir alternatif yang mengakar pada kebudayaan dan nilai kolektif. Dengan menggabungkan filsafat Barat dan lokal, kita bisa membangun kerangka etika politik yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam masyarakat majemuk.

Etika kekuasaan yang ditawarkan oleh filsafat juga mencakup pengakuan atas keterbatasan manusia dalam berpolitik. Filsuf seperti Paul Ricoeur mengajukan etika sebagai upaya untuk “hidup bersama dengan dan untuk orang lain dalam institusi yang adil.” Ini menunjukkan bahwa politik harus dijalankan dengan kesadaran akan tanggung jawab moral terhadap sesama. Dalam situasi penuh ketidakpastian, politik bukan soal menang atau kalah, tetapi soal membangun ruang hidup bersama yang layak. Oleh karena itu, filsafat menuntut penguasa untuk tidak hanya bertindak strategis, tetapi juga reflektif. Dengan demikian, tindakan politik tidak hanya diarahkan pada hasil, tetapi juga pada cara dan nilai yang menyertainya (Simon 2018).

Berdasarkan uraian diatas, kita bisa melihat bahwa filsafat politik mampu menawarkan kerangka etis yang kritis sekaligus konstruktif dalam menghadapi realitas politik yang pragmatis. Ia tidak menolak kenyataan, tetapi menempatkan nilai-nilai moral sebagai kompas dalam pengambilan keputusan politik. Baik melalui teori keadilan, komunikasi rasional, kritik

ideologi, maupun nilai lokal, filsafat menyediakan fondasi etik yang penting untuk menjaga integritas kekuasaan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh godaan pragmatisme, refleksi filosofis menjadi penting agar kekuasaan tidak melupakan tanggung jawab moralnya. Filsafat mengingatkan bahwa kekuasaan yang benar adalah kekuasaan yang etis, dan kekuasaan yang etis adalah yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan.

5. Etika Kekuasaan Dalam Konteks Politik Indonesia Kontemporer

Konteks politik Indonesia modern memperlihatkan paradoks yang kuat antara cita moral dan realitas praksis kekuasaan. Di satu sisi, sistem demokrasi Indonesia dibangun di atas prinsip moral Pancasila, yang menempatkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah sebagai landasan normatif kehidupan politik (Noor Efendy dkk. 2023). Namun di sisi lain, praktik kekuasaan sering kali dikuasai oleh logika pragmatis dan kepentingan elektoral jangka pendek. Fenomena ini memperlihatkan jarak yang lebar antara ideal moral bangsa dan perilaku elite politik dalam realitas kontemporer. (Geraldny dan Kusuma 2025) Politik Indonesia hari ini kerap diwarnai oleh penggunaan kekuasaan untuk membangun citra, bukan membangun moralitas publik.

Manipulasi media, penyebaran disinformasi, serta politik identitas berbasis agama dan etnis menjadi instrumen untuk merebut legitimasi politik. (Hariyanto dkk., t.t.) Kondisi ini menggambarkan bahwa kekuasaan telah bergeser dari orientasi pelayanan menuju mekanisme kompetisi pragmatis. Dalam situasi semacam ini, filsafat politik menjadi penting karena menawarkan refleksi kritis terhadap bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan dengan tanggung jawab moral dan rasionalitas etis (Setiawan dan Fauzi 2019). Dalam pandangan klasik, kekuasaan yang tidak berlandaskan kebajikan akan

kehilangan legitimasi moralnya. Prinsip ini tetap relevan dalam konteks Indonesia masa kini. Kepemimpinan publik yang etis menuntut pemimpin untuk bertindak sebagai teladan moral, bukan hanya sebagai pengelola kekuasaan. Kekuasaan tanpa kebajikan mudah terjebak dalam penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan praktik nepotisme gejala yang masih membayangi sistem politik nasional hingga kini. (Azhary 2019) Etika kekuasaan, dalam konteks ini, tidak sekadar berbicara tentang perilaku individu pemimpin, tetapi juga mencakup sistem nilai dan budaya politik yang menopangnya.

Kekuasaan tidak hanya bekerja melalui lembaga formal, tetapi juga melalui wacana, simbol, dan pengetahuan yang mengatur kesadaran masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa etika kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh elite, tetapi juga oleh partisipasi publik dan kesadaran moral warga negara. Ketika masyarakat permisif terhadap praktik politik yang manipulatif, struktur kekuasaan yang tidak etis akan terus bertahan. (Hannan dan Abdillah 2019) Oleh karena itu, pendidikan etika politik publik menjadi kunci dalam membangun moralitas demokrasi yang sehat.

Selain itu, perkembangan teknologi digital telah menimbulkan bentuk baru kekuasaan yang lebih halus dan kompleks. Melalui media sosial, kekuasaan kini bekerja dalam bentuk pengendalian opini dan penciptaan narasi politik yang direkayasa. Dalam hal ini, kekuasaan digital memerlukan etika baru etika komunikasi politik yang berbasis kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab moral. (Lase 2024) Pemimpin politik tidak hanya harus bertanggung jawab terhadap kebijakan, tetapi juga terhadap cara mereka memengaruhi kesadaran publik melalui teknologi.

Pancasila dapat dipahami sebagai fondasi etika kekuasaan yang khas Indonesia. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial memberikan kerangka

moral bagi penyelenggara negara untuk menjalankan kekuasaan dengan adab dan integritas.(Difia dan Norma 2024) Namun, agar nilai-nilai ini berfungsi secara praksis, Pancasila perlu dihidupkan kembali bukan sebagai doktrin normatif, melainkan sebagai sistem etika yang mewujud dalam tindakan politik sehari-hari. Kekuasaan yang beretika berarti kekuasaan yang berpihak pada kemanusiaan, menjaga keadilan, dan menjunjung kebenaran, bukan sekadar mempertahankan dominasi.(Sianturi dan Riyanto 2025) Dengan demikian, etika kekuasaan dalam konteks politik Indonesia kontemporer menuntut integrasi antara moralitas Pancasila, tanggung jawab sosial, dan kesadaran kritis terhadap kekuasaan. Hanya dengan cara ini kekuasaan dapat dijalankan sebagai amanah etis, bukan sekadar instrumen dominasi. Politik yang beretika bukanlah utopia moral, melainkan prasyarat bagi keberlangsungan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat.

D. KESIMPULAN

Hubungan antara kekuasaan dan etika dalam filsafat politik menunjukkan dinamika historis yang terus berubah. Dalam tradisi klasik, seperti yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, kekuasaan memiliki orientasi moral yang jelas politik dipahami sebagai sarana mewujudkan kebaikan dan keadilan. Namun, tradisi modern, melalui pemikiran Machiavelli, memisahkan moralitas dari politik demi efektivitas kekuasaan. Filsafat kontemporer kemudian mengkritik kedua posisi ekstrem ini dengan menawarkan pembacaan yang lebih kompleks terhadap kekuasaan dan moralitas.

Transformasi pemahaman ini menunjukkan bahwa relasi antara kekuasaan dan etika bersifat dialektis dan tidak pernah final. Setiap bentuk kekuasaan selalu

membawa konsekuensi moral, sementara setiap prinsip etika diuji oleh realitas kekuasaan. Karena itu, tanggung jawab etis merupakan fondasi legitimasi politik yang sejati. Tindakan politik yang mengandung manipulasi atau kekerasan menimbulkan dilema moral yang mendalam. Pendekatan deontologis menolak pembenaran moral atas pelanggaran prinsip, sedangkan pendekatan utilitarian menilai berdasarkan hasil. Namun keduanya menegaskan bahwa kekuasaan tanpa etika kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik. Filsafat politik, dalam hal ini, berperan bukan hanya untuk memahami kekuasaan, tetapi juga untuk menilai dan menuntunnya secara moral. Politik yang etis adalah politik yang menempatkan martabat manusia dan keadilan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai alat retorik. Di tengah realitas politik yang semakin pragmatis, filsafat menawarkan kerangka etis yang normatif dan reflektif. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan rasionalitas komunikatif menjadi panduan agar kekuasaan tidak kehilangan arah moralnya. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar etika kekuasaan yang relevan dan kontekstual, menyeimbangkan antara efektivitas politik dan tanggung jawab moral. Pancasila tidak hanya simbol ideologis, tetapi kompas etis yang mengarahkan kekuasaan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, manusiawi, dan bermartabat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa refleksi filosofis terhadap etika kekuasaan penting untuk membangun politik yang sah secara hukum sekaligus adil secara moral. Etika menjadi ukuran kemanusiaan dalam kekuasaan, dan kekuasaan yang beretika adalah fondasi bagi politik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Andini, dkk. 2024 "Konsep Hukum dan Keadilan Plato". Jurnal Filsafat Terapan.

Azhary dan Handani. 2024. "Nepotisme Dan Gratifikasi Sebagai Unsur Budaya Pada Korupsi Politik Dan Birokrasi Di Indonesia".

- Bendianto, dkk. 2024. "Representasi Kebenaran (Verum) Dalam Dunia Politik Di Indonesia: Usaha untuk Menciptakan Keadilan Sosial dalam Terang Immanuel Kant." *Aggiornamento* 4 (02): 1–13. <https://doi.org/10.69678/aggiornamento4021-13>.
- Difia dan Fitria. "Pancasila Dan Etika Profesi: Penerapan Nilai-Nilai Moral Dalam Kehidupan." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4 (2): 44–55. <https://doi.org/10.36456/p.v4i2.9205>.
- Geraldly, dkk. Etika Politik Deliberasi dalam Konstelasi Pilkada. 2.
- Hannan, Abd, dan Kudrat Abdillah. "Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi Sosial Mobilisasi Jaringan Kekuasaan Dan Keagamaan Kyai Dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat." *Jurnal Sosial Budaya* 16 (1): 9. <https://doi.org/10.24014/sb.v16i1.7037>.
- Hariyanto, dkk. *Komodifikasi Agama Dalam Politik Identitas*.
- Jemali, Maksimilianus. 2015. "ESKALASI TINDAKAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HANNAH ARENDT." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio* 7 (1): 20–31. <https://doi.org/10.36928/jpkm.v7i1.18>.
- Jumartono, 2023 "Etika Politik Dalam Pandangan Haedar Nasher", [Tesis] Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta Fakultas Ushuluddin.
- Kusuma, Adhyatma Dani, Abdulla Abdul Aziz, Tasya Dania Azzahra, dan Nurhidayah Ilham. t.t. *Kewajiban Sumpah Saksi di Persidangan Dengan Moralitas Hukum Menurut Perspektif Immanuel Kant*.
- Lase, Yan Utama Putra. t.t. *TANTANGAN ETIKA KOMUNIKASI POLITIK DALAM ERA DESINFORMASI: PERSPEKTIF SOSIAL MEDIA*.
- Machiavelli, Niccolò. 2014. *The Prince | Bilingual Edition*. East-West Publishing House.
- Maleng, Fidelis Roy, Dominikus Zinyo Darling, dan Agustinus Agrolis Longko Nadu. 2024. *Analisis Film Dirty Vote dan Usaha Menyelamatkan Demokrasi Indonesia di Era Post-Truth*. 6 (2).
- Maulidiastuti, Syahdidatul Faizah, dan Anas Ahmadi. t.t. "Representasi Hegemoni Gramsci dalam Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar Karya Tere Liye."
- Noor Efendy, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar. 2023. "Membangun Hukum Yang Adil Dalam Bingkai Moralitas Pancasila." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 (4): 656–78. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.195>.
- Pangareho, Nikodemus. 2024. *Dinamika Politik Pancasila: Antara Idealisme dan Realitas dalam Konteks Indonesia*. 23 (2).
- Parks, Tim. 2014. *Prince*. Penguin Books Ltd.
- Plato The Republic. 2018. (Cambridge, Trans Tom Griffith).
- Putri, Khoerunnisa Armina, Abdurrahman Muvid, dan Muhammad Faisal Firdaus. t.t. *Konsep Hak Menurut Aristotle*.
- Rahmadewi, Raisha, Nadhif Tanzil Haikal Harahap, dan Rian Hidayatulloh. t.t. *Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Rawls, John. 2005. *A Theory of Justice: Original Edition*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvjf9z6v>.
- Faturrahman. 2025. "Agama Dan Kekuasaan: Analisis Perspektif Filsafat Politik Nicollo Machiavelli". [Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta Fakultas Ushuluddin].
- Rizqian, Dimas Rahman. 2023. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS." *Jurnal El-*

- Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan* 8 (2): 1–21.
<https://doi.org/10.62630/elhamra.v8i2.121>.
- Sanit, Arbi. 2015. “Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan.” *Jurnal Politik* 1 (1): 155–76.
<https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.12>.
- Setiawan, Anang, dan Erinda Alfiani Fauzi. 2019. “Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.” *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 1 (1): 1–12.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614>.
- Sianturi, dkk. Paradigma Keadilan Struktural & Dialog: Reaktualisasi Yohanes XXIII Dalam Pacem In Terris Bagi Perdamaian Kontemporer.
- Simon, John Christian. 2018. “Sumbangan Paul Ricoeur dalam Proses Berteologi.” *GEMA TEOLOGIKA* 3 (1): 1.
<https://doi.org/10.21460/gema.2018.31.338>.
- Siswadi, A.G. dkk. 2024. Filsafat Manusia Memahami Manusia Sebagai Homo Complexus.” Solok: Pt Mafi Literasi Indonesia.
- Siregar, Mangihut. 2021. “Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 1 (1).
<https://doi.org/10.30742/juisspol.v1i1.1560>.
- Solosumantro, Heribertus. 2025. *Etika Moral Jean-Jacques Rousseau dalam Ruang Perpolitikan di Indonesia*. 1 (1).
- Syamsuddin, Dr Muhammad Sirajuddin, dan Dr Zulkifli. t.t. Konsentrasi Agama Dan Studi Perdamaian Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta 1443 H / 2021 M.
- Wijaya, Daya Negri. 2016. “Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1 (2): 183–93.
<https://doi.org/10.17977/um021v1i22016p183>.
- Zakiah, Zakiah, Raisa Agnia, Hani Sri Handayani, Zahra Davika, Ahmad Ramdani, dan M.Z Syafiq M.Z Syafiq. 2024. “Diskursus Publik dan Relevansi Dengan Legitimasi Kekuasaan Dari Teori Habermas.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3 (2).
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.807>.